

## ***PSBB Diperpanjang Hingga 8 Februari***

secara mikro. Masyarakat yang beraktivitas di Kabupaten Karawang wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dan pemberlakuan PSBB secara proporsional ini dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana berharap Satgas Covid-19 bisa meningkatkan kinerja masing-masing bidang, untuk berperan dalam menekan laju penularan virus corona di Karawang. "Kita harus pastikan bahwa tracing, testing dan treatment kita berjalan dengan baik. Ini penting karena itu merupakan langkah yang tepat untuk menangani pandemi," ujarnya, kemarin.

Cellica menuturkan, upaya pencegahan harus dimulai dari wilayah paling dekat dengan masyarakat. "Kita harus pastikan kinerja di tingkat paling bawah berjalan dengan baik. Sosialisasi harus digalakkan," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga resmi memperluas PSBB proporsional di wilayahnya. Semua daerah di Jabar kini memberlakukan PSBB proporsional.

Semula, pada PPKM jilid I hanya 20 daerah yang melaksanakan PSBB proporsional. Kebijakan PSBB proporsional untuk seluruh wilayah di Jabar ini dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur dengan Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021 tertanggal 25 Januari 2021. Surat tersebut ditandatangani Ridwan Kamil. Dalam surat itu,

disebutkan pertimbangan memperluas PSBB proporsional dikarenakan kriteria tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di 27 kabupaten/kota masih belum turun secara signifikan.

Emil meminta agar para kepala daerah di 27 kabupaten/kota untuk melakukan PSBB secara Proporsional dalam skala mikro. Masyarakat yang tinggal di Jabar diwajibkan menaati ketentuan yang berlaku dalam PSBB proporsional. "PSBB secara proporsional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketua dan Diktum ketiga dapat diperpanjang apabila penyebaran COVID-19 belum dapat dikendalikan secara optimal," bunyi penetapan ke delapan keppub tersebut. (psn/nt)